

Pengaruh Kebijakan Pemberdayaan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah

The Influence of MSME Empowerment Policy on the Regional Economy

Ramadha Yanti Parinduri¹, Mahyudin Situmeang^{2*}

^{1,2}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Cooresponding author: mahyudinsitumeang1@gmail.com*

Abstrak

Kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh aktor kebijakan saat ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakatnya. Sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar pelaku ekonomi dan penyerapan tenaga kerja termasuk dalam pengembangan UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemberdayaan UMKM terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Samosir. Metode penelitian menggunakan kualitatif diskriptif dengan teknik pengumpulan datanya yakni observasi wawancara dan kajian literatur. Teknik analisa data yang digunakan yaitu metode reduksi data, display data dan kesimpulan. Teori yang digunakan implementasi kebijakan publik George C Edward III tentang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) stuktur birokrasi, (3) sumberdaya, (4) disposisii (sikap). Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir menunjukkan hubungan komunikasi dilakukan secara intensif dan konsisten, serta didukung keterlibatan stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah dan pemanfaatan media teknologi whatsapp sebagai sarana komunikasi. Terbentuknya struktur pelaksana dan pembagian tugas yang jelas, dan di dukung sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia, serta terbentuknya disposisi pelaksana secara hirarkis dan disposisi kepada stakeholder serta sikap pelaksana yang antusias dalam meng implementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemberdayaan, dan Perekonomian Daerah

Abstract

Government policies implemented by current policy actors must be seen as planned, programmed, systematic and sustainable efforts in order to improve the welfare and quality of life of all citizens. A people's economic system aimed at reducing the problem of income disparities between economic actors and absorbing labor is included in the development of MSMEs. The aim of this research is to describe and find out how the MSME empowerment policy impacts the regional economy in Samosir Regency. The research method uses descriptive qualitative with data collection techniques, namely interview observation and literature review. The data analysis techniques used are data reduction methods, data display and conclusions. The theory used to implement George C Edward III's public policy regarding policy implementation is influenced by four variables, namely: (1) communication, (2) bureaucratic structure, (3) resources, (4) disposition (attitude). These four variables are related to each other. The results of research on MSME empowerment policies in Samosir Regency show that communication relations are carried out intensively and consistently, and are supported by the involvement of stakeholders, the private sector and non-governmental organizations and the use of

WhatsApp technology media as a means of communication. The formation of an implementing structure and clear division of tasks, supported by human and non-human resources, as well as the formation of a hierarchical disposition of implementers and disposition towards stakeholders as well as an enthusiastic attitude of implementers in implementing the MSME empowerment policy..

Keywords: Public Policy, Empowerment, and Regional Economy

PENDAHULUAN

Pemberdayaan itu merupakan suatu proses pembangunan dengan tujuan membuat masyarakat bernisiatif untuk menjalankan kegiatan sosial demi memperbaiki dirinya sendiri. Sering dikatakan pemberdayaan ini bersifat inklusif dalam arti melibatkan masyarakat atas sasaran dalam program [1]. Berhasilnya suatu pemberdayaan disebabkan oleh faktor partisipasi dan keaktifan masyarakat terhadap pihak pemberdaya, tujuan dari pemberdayaan ini yaitu untuk memperbaiki kelembagaan, usaha, pendapatan masyarakat, lingkungan dan ekonomi daerah agar menjadi lebih baik.

Pemberdayaan meliputi pembangunan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui objek dan subjek pembangunan terhadap masyarakat. Tujuan pembangunan daerah ini mengisi dan melengkapi kekurangan dari masyarakat itu sendiri. Demi mencapai tujuan pembangunan tersebut maka dilakukan pembangunan dari segala bidang mulai dari bidang ekonomi, pemerataan sumber daya, stabilitas dan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat bilamana tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Akan tetapi Anggraeni dkk mengatakan bahwa perekonomian masyarakat dapat menjamin dan diselamatkan oleh kebijakan dari pemerintah itu sendiri [2].

Table 1. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Kabupaten Samosir Menurut Pengeluaran
(Persen)

	Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
N 0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,71	-1,41	2,64	59,80%	58,75%	58,74%
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,71	1,40	0,88	2,36%	2,40%	2,37%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,18	-0,33	0,81	21,97%	21,54%	21,36%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,10	-3,08	5,62	14,32%	13,88%	14,39%
5	Perubahan Inventori	-	-		3,80%	4,29%	4,39%
6	Ekspor Antar Daerah	5,45	-4,51	6,27	23,83%	24,80%	26,18%
7	Impor Antar Daerah	4,02	-5,22	5,99	26,08%	25,65%	27,34%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,70	-0,59	2,65	100,00	100,00	100,00

Sumber BPS Kabupaten Samosir 2022

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mencapai Rp

4.755,23 miliar dan dari perbandingan pertumbuhan ekonomi sebelumnya Kabupaten Samosir meningkat 2,65% dari tahun sebelumnya [3]. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah adanya faktor yang mendukungnya seperti lahan pertanian dimana pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian mengalami pergeseran yang lebih baik yang disebabkan oleh adanya peningkatan sumbangan dari masing-masing subsektor. Menurut hasil penelitian Manaor Silitonga dkk bahwa salah satu faktor yang membuat daerah kabupaten Samosir meningkat pertumbuhannya disebabkan oleh 2 alasan yaitu adanya sektor basis meliputi sektor penyediaan makanan dan minuman hal ini dikarenakan daerah samosir adalah daerah pariwisata, dan sektor kedua adalah disebabkan oleh sektor pertanian, dan pemerintahan [4]. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga stabilitas perekonomian di Kabupaten Samosir perlunya menjaga stabilitas sektor pertaniannya agar terjaga dengan baik. Salah satu terobosan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Samosir adalah memberdayakan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah [5].

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan PP No. 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 maka pemerintah membuat kebijakan mengenai program-program pemberdayaan UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kebijakan pemerintah dimana tujuan dari bidang ini adalah untuk menggalakan ekonomi menjadi lebih baik. Fidianing Sopah dkk mengatakan UMKM itu merupakan langkah yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran [6]. Karena salah satu faktor kemiskinan itu pada dasarnya adalah tingkat ekonominya tidak stabil [7]. Keberhasilan sebuah daerah salah satunya adalah dari sisi ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari meningkatnya jumlah *intrepeneur* yang awalnya bermula dari tingkatan usaha mikro dan kecil yang terus berkembang menjadi usaha besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertentu.

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah dan dipilih menjadi sebuah keputusan tidak dapat dipastikan bahwa itu adalah sebuah jaminan akan berhasil dilakukan. Namun ada beberapa aspek yang menentukan berhasilnya suatu kebijakan tersebut, baik yang bersifat individu atau kelompok. Berhasilnya kebijakan itu ditentukan oleh rencana kebijakan, implementasinya dan sisanya bagaimana pengendalian implementasinya [8]. Hal ini dirumuskan oleh Grindle bahwa tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan, apalagi menyangkut publik didasari oleh isi kebijakan antara lain kepentingan publik, manfaat kebijakan, perubahan yang diharapkan dan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan

[9].

Berdasarkan analisis dan kajian sebelumnya Kabupaten Samosir merupakan wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang memadai namun akan kalah dengan kompetensi sumber daya manusianya yang sangat rendah. Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya tersebut adalah disusun suatu kebijakan yang dapat membantu masyarakat untuk mengelola lingkungan sekitarnya yang disebut dengan pemberdayaan UMKM di Kawasan Pariwisata dan memberdayakan ekonomi kreatif. Dengan kebijakan tersebut masih banyak masyarakat yang belum beradaptasi bahkan menerapkannya. Melalui latar belakang masalah, peneliti tertarik bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pemberdayaan terhadap perekonomian pada Kabupaten Samosir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan kajian literasi yang menyangkut dengan judul penelitian yakni jurnal, buku, dokumen dan website yang resmi. Dimana dalam analisis datanya menggunakan teknik Model Miles dan Huberman dimana analisa datanya tersebut terdiri dari reduksi data, data display, dan menyimpulkan [10].

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012) dalam Lumbantobing dan Sihombing mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu, hal ini dijelaskan oleh George C. Edward III dalam Ismail mengatakan bahwa implementasi suatu kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [11]. Artinya, kebijakan itu adalah tindak lanjut dari sebuah program atau implementasi kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Berkaitan dengan pengertian pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan dan pengawasan [12].

Berdasarkan Peraturan Bupati Samosir No 89 Tahun 2022 menjelaskan bahwa tugas pemberdayaan UMKM sejatinya dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Samosir melalui Kepala Bidang UMKM [13]. Dalam hal ini pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir dilakukan secara gotong royong atau lebih dikenal *collaboratif government*. Berdasarkan realitas

dilapangan Dinas UMKM dan Koprasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Samosir memiliki keterkaitan dalam pemberdayaan UMKM. Selain itu swasta (Industri Migas, Perbankan daerah dan lembaga *finance*), orgnisasi non pemerintah (Ikatan Industri Kecil Menengah Kabupaten Samosir) terlibat dalam pemberdayaan UMKM di kabupaten Samosir

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir

1. Keberhasilan kebijakan salah satunya dipengaruhi faktor Komunikasi. Realisasi komunikasi dengan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir terjadi komunikasi antara pembuat kebijakan dengan Implementor secara jelas, intens dan konsisten sehingga terciptanya transmisi yang baik. Adapun komunikasi dilakukan dari implementor kebijakan dengan pemangku kebijakan secara formal, selain itu juga terjadi komunikasi dari implementor kebijakan dengan stakeholder, swasta, organisasi non pemerintah dan pelaku UMKM.
2. Struktur birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Realisasi struktur birokrasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir terbentuknya struktur pelaksana dan pembagian tugas yang jelas, namun dilain sisi tidak adanya *Standart Operational Procedures* sebagai prosedur kerja secara sistematis yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Sumber Daya merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan Kebijakan. Pemerintah – pemerintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten serta kerja sama yang dilakukan oleh struktur organisasi, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Berkaitan dengan Realisasi Sumber Daya yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir, meliputi sumber daya manusia pelaksana program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir hanya di dukung oleh Dinas-Dinas yang berkaitan, swasta dan Organisasi non Pemerintah, berkaitan dengan sumber keuangan program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir bersumber dari APBD sebagai program prioritas pembangunan, berkaitan fasilitas lainnya dalam pemberdayaan di Kabupaten Bojonegoro di suport oleh insfraktur seperti galeri pemasaran hasil produk UMKM, gedung pelatihan dan lainnya.
4. Peran sikap pelaksana dalam kebijakan sangat penting, meskipun para

pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak sependapat terhadap kebijakan tersebut, maka akan mengarah untuk tidak dilakukan. Dalam hal ini Realisasi Disposisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir, berkaitan dengan Disposisi pelaksana terbentuknya prespsi, respon dan tindakan yang antusias dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM karena pelaksana juga bagian dari pelaku UMKM. Berkaitan disposisi penugasan terbentuknya satu disposisi secara hirarkis dari atasan ke bawahan, serta pelibatan stakeholder.

5. Peran stakeholder, dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Samosir stakeholder, Swasta dan organisasi non pemerintah ikut serta dalam pemberian pelatihan dan pendidikan terakait pengembangan UMKM di Kabupaten Samosir, pendampingan produksi, pemasaran produk, dan pemberian akses pemodal tanpa anggunan serta bantuan perijinan.

c. Perekonomian Daerah Kabupaten Samosir

Menurut Wahyunti faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di era modern beragam. Ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan [14]. Beberapa faktor produksi tersebut yaitu:

1. Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
2. Akumulasi Modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu
3. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas
4. Kemajuan Teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, modal, dan faktor produksi lainnya.
5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi, spesialisasi dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas." Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membantu perkembangan industry.

Pembuatan kebijakan program pemulihan ekonomi melalui penguatan modal usaha sangat penting untuk keberlangsungan UMKM, dimasa masyarakat malas karena kurangnya suatu support dari pemerintah itu sendiri. Upaya pemerintah yang dilakukan terhadap perekonomian di Kabupaten Samosir adalah melakukan pengembangan sektor UMKM, pembinaan UMKM, dan menyediakan modal UMKM nya.

- d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Daerah Melalui UMKM di Kabupaten Samosir.

Sesuai dengan analisis terhadap pencapaian perekonomian kabupaten maka dapat dikemukakan bahwa beberapa faktor secara teoritis kemudian dicocokkan dengan data empiris diketahui bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM berbasis produk kearifan lokal antara lain :

1. Faktor Internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam, dimana faktor dimaksud terdiri dari :
 - a. Keterbatasan modal usaha yaitu menyangkut kebutuhan penganggaran usaha dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha serta perluasan volume usaha. Dimana, kondisi UMKM di Kabupaten Samosir hingga tahun 2020 masih memerlukan tambahan modal usaha.
 - b. Mahalnya biaya infrastruktur yaitu menyangkut kebutuhan bahan baku serta barang pendukung produksi yang terkategori mahal serta masih diperoleh dari daerah lain, misalnya bahan baku material, kemasan produk, alat produksi dan lain-lain, yang kemudian menjadi penyebab tingginya nilai jual produk kearifan lokal yang dihasilkan oleh UMKM.
 - c. Pelayanan birokrasi yang kurang efisien yaitu menyangkut cara kerja instansi pemerintah dalam mengatur dan melayani UMKM yang dinilai masih kurang maksimal, sehingga diperlukan beberapa perbaikan maupun peningkatan, khususnya dari sisi sosialisasi dan penyebaran informasi terkait program dan kebijakan menyangkut UMKM yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat, sebab masih terdapat sejumlah UMKM yang belum terdaftar secara legal di instansi pemerintahan.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar, dimana faktor dimaksud terdiri dari :
 - a. Pemasaran, adalah menyangkut kebutuhan penjualan barang maupun bahan yang dihasilkan oleh UMKM kepada konsumen, dimana pelaku UMKM berbasis kearifan lokal umumnya mengalami keterbatasan dalam hal konsumen, yang umumnya didominasi oleh wisatawan maupun penduduk lokal yang membeli produk UMKM hanya untuk keperluan tertentu seperti oleh-oleh dan lain-lain. Selain itu, daya saing produk yang cukup rendah di pasar umum dengan tawaran harga yang terbilang mahal menjadi kendala tersendiri bagi produk UMKM berbasis kearifan lokal untuk bersaing di dunia pasar.
 - b. Kelembagaan dan SDM, yaitu menyangkut status lembaga/tempat usaha bagi UMKM serta kapasitas Sumber Daya Manusiannya, dimana khusus di Kota Ternate, masih terdapat sejumlah UMKM yang terlambat untuk melengkapi usahanya dengan surat Izin Usaha

Mikro Kecil (IUMK), sehingga menyebabkan UMKM terkait terlambat untuk sejumlah bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lainnya dalam rangka upaya pengembangan UMKM.

- c. Kemampuan intelektual yang terbatas dari pelaku UMKM yaitu menyangkut keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi terkini, diantaranya menyangkut desain kemasan dan pemanfaatan teknologi terkini untuk meningkatkan pemasaran produk. Dimana, untuk desain kemasan pelaku UMKM umumnya masih bergantung pada pihak lain yang tentunya memerlukan biaya tambahan. Sedangkan, untuk pemasaran produk berbasis digital, masih terdapat pelaku UMKM yang belum dapat memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemberdayaan memiliki pengaruh yang relevan terhadap perekonomian daerah dimana suatu kebijakan itu mengatur dan memberikan hak bagi pelaku UMKM. Karena kebijakan sebagai pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu, maka implementasi suatu kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian tersebut berdasarkan hasil dan pembahasan di atas adalah pelayanan birokrasi yang kurang efisien terhadap pelaku UMKM yang mana sumber daya dari aktor pemangku kebijakan itu masih rendah sehingga pelaku UMKM merasa malas dalam pengurusan surat izin usaha pada Kabupaten Samosir. Komunikasi yang dilakukan pada pemberdayaan UMKM ini sering kali tidak berjalan secara parsial dimana terkait akses dalam pengurusan surat izin usaha tidak berjalan secara efektif artinya informasi yang didapat sebagai syarat dalam pengurusan tidak disampaikan secara jelas.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu perlunya peningkatan kemampuan intelektual pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk desain kemasan dan pemasaran produk. Perlunya peran stakeholder, baik swasta maupun organisasi non-pemerintah, dalam memberikan pelatihan, pendampingan produksi, pemasaran produk, serta akses pemodal dan perijinan bagi UMKM. Secara umum peningkatan kapasitas pelaku UMKM perlu menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. A. Johar, “REALITAS PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA,” *J. Ilmu Lingkung.*, vol. 15, no. 1, hal. 54–65, 2021, doi: 10.31258/jil.15.1.p.54-65.
- [2] W. C. Anggraeni, W. P. Ningtias, dan N. Alimah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *J. Gov. Polit.*, vol. 3, no. 2, hal. 47–65, 2021, doi: 10.31764/jgop.v3i1.5354.
- [3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2021 No. 001/04/1217/Th.VII, 22 April 2022,” Pangururan, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://samosirkab.bps.go.id/pressrelease/2022/04/22/154/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-samosir-tahun-2021.html>
- [4] M. Silitonga, P. L. Hutagalung, dan J. A. Gultom, “Potensi Dan Realitas Sektoral Dalam Pengembangan Perekonomian Kabupaten Samosir,” *SKYLANDSEA Prof. J. Ekon.*, vol. 3, no. 1, hal. 19–24, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://www.jurnal.yappsu.org/index.php/skylandsea/article/view/125/130>
- [5] M. S. Samosir, M. S. Utama, dan A. Marhaeni, “Analisis Pengaruh Pemberdayaan Dan Kinerja Umkm Terhadap Kesejahteraan Pelaku Umkm Di Kabupaten Sikka-Ntt,” *E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 5, no. 5, hal. 1359–1384, 2016, [Daring]. Tersedia pada: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/18318>
- [6] F. Sopah, W. Kusumawati, dan K. E. Wahyudi, “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo,” *Ide Sintaks*, vol. 2, no. 6, hal. 26–40, 2020, doi: 10.46799/syntax-idea.v2i6.339.
- [7] S. E. Safitri dan N. Triwahyuningtyas, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN,” *SIBATIK J.*, vol. 1, no. 4, hal. 259–274, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i4.30.
- [8] J. SONDA, B. KIYAI, dan H. Kolondam, “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa,” *J. Adm. PUBLIK*, vol. 4, no. 62, hal. 72–82, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/21229>
- [9] H. B. Lumbantobing dan T. Sihombing, “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kabupaten Samosir,” *Prof. J. Komun. Dan Adm. Publik*, vol. 9, no. 2, hal. 485–486, 2022, doi: 10.37676/professional.v9i2.3320.
- [10] I. H. Yakin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Garut: CV. AKSARA GLOBAL AKADEMIA, 2023.
- [11] H. Ismail, “STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO,” *J. Mediasosian J. Ilmu Sos. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, hal. 143–157, 2022, doi: 10.30737/mediasosian.v6i1.2396.
- [12] D. A. Rangkuti, Y. Ernanda, R. Khairani, I. N. P. Siregar, I. A. Nasution, dan D. Sakuntala, “Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bahari Belawan dalam Pelatihan Daur Ulang Cangkang Kerang Menjadi Produk Kreatif dan Komersil,” *J-LAS (Journal Liaison Acad. Soc.)*, vol. 3, no. 3, hal. 1–8, 2023, doi: 10.58939/j-las.v3i3.610.
- [13] Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 94 Tahun 2022, “Peraturan Bupati Samosir No 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Samosir,” Pangururan, 2022.
- [14] S. Wahyunti, “Peran Strategis UMKM dalam Menopang Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Syariah,” *J. Ekon. Syariah*, vol. 3, no. 2, hal. 280–302, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/554>